

**KEKERASAN NEGARA DAN PERLAWANAN MAHASISWA
DI TENGAH KRISIS
Oleh Triyono Lukmantoro**

Triyono Lukmantoro, lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Oktober 1997. Semenjak bulan Februari 1998, tercatat sebagai staf pengajar pada almamaternya.

Krisis moneter yang tidak dapat diatasi secara cepat oleh rezim Orde Baru menciptakan krisis kredibilitas, yang mendorong munculnya keadaan yang semakin represif. Ini ditandai oleh tindak kekerasan aparat militer terhadap berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Hal ini memberikan bukti yang signifikan bahwa rezim Orde Baru, sesungguhnya, tidak sedang menjalankan kekuasaan yang saling mengakui dan komunikatif, namun lebih mengandalkan metode kekerasan (*force*) yang sangat opresif. Tetapi, kesemua kekerasan yang dijalankan negara itu justru tidak menyurutkan langkah perlawanan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa yang selama ini diposisikan sebagai *the Other* oleh pihak negara.

Bila semua jalan penyaluran aspirasi rakyat telah disumbat, maka mau tidak mau alternatif terakhir yakni “aksi turun ke jalan” atau “parlemen jalanan” merupakan konsekuensi logis yang secara moral sah.

(Sidney Hook, dalam “Protes Sosial dan Keras Kepala yang Beradab”, 1994)

Maraknya demonstrasi yang digelar kalangan mahasiswa untuk menuntut dilaksanakannya reformasi total dalam tatanan kehidupan rezim Orde Baru, memang, tidak dapat disepadankan dengan peristiwa-peristiwa sejenis yang terjadi di Perancis pada bulan Mei 1968. Demonstrasi mahasiswa yang mencoba melakukan gugatan, atau bahkan dapat disebut sebagai perlawanan aktif, terhadap rezim Orde Baru adalah akibat krisis ekonomi yang terus memburuk. Hal ini ditandai dengan langkanya persediaan sembako (sembilan bahan pokok), sehingga masyarakat harus berebut serta melakukan antrean untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari itu. Fenomena semacam ini barangkali merupakan mimpi buruk yang paling menakutkan bagi rezim Orde Baru. Sebab, rezim Orde Baru semenjak awal didirikannya memberikan janji-janji untuk mengenyangi perut masyarakat yang berkoar karena lapar ketimbang menyusun agenda politik yang menonjolkan karakter ideologis. Namun, janji-janji itu agaknya justru berbalik serta menikam kesombongan rezim Orde Baru yang selama ini mengklaim suksesnya pembangunan yang dilaksanakannya. Sementara, dalam realitas sosiologis, yang berlangsung di Perancis adalah sebuah perlawanan dalam kondisi masyarakat yang sudah maju serta bahkan mengalami kekenyangan yang luar biasa.

Relasi Kekuasaan/Pengetahuan

Meskipun demikian, jarak yang merentang dalam tiga dasa warsa yang terjadi di Perancis dengan demonstrasi akibat kredibilitas rezim Orde Baru yang terus merosot, secara sekilas, mempunyai persamaan yang sangat signifikan. Peristiwa Mei 1968 yang berlangsung di Perancis adalah ketidakpercayaan terhadap sistem kekuasaan yang diterapkan yang selama ini didukung oleh sejumlah

kalangan intelektual terkemuka Perancis. Sebelum peristiwa Mei 1968, sejumlah kalangan poststrukturalis seperti Baudrillard, Foucault, Derrida, Lyotard, serta Deleuze, mempunyai keterkaitan kepentingan – atau paling tidak bersimpati – dengan kelompok-kelompok politik atau partai-partai yang berhaluan Kiri. Namun, semenjak pecahnya peristiwa Mei 1968 yang dapat dilacak dari poster-poster serta liflet-liflet yang tertempel di dinding-dinding mengungkapkan suatu protes serta mempertanyakan tidak hanya sistem kapitalisme, demokrasi perwakilan, serta birokrasi, tetapi juga melakukan gugatan terhadap kehadiran partai-partai Kiri, sistem bintang intelektual radikal, serta budaya sehari-hari dalam sistem kapitalisme yang sudah maju (Poster, 1990: 131). Dalam universitas serta bagi kalangan intelektual sendiri, peristiwa-peristiwa Mei 1968 menempatkan suatu pertanyaan yang mencoba menggugat relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan, serta bagaimana pendidikan justru diorganisasikan untuk mengawetkan sistem kapitalis (Macdonell, 1986: 14).

Demikianlah, maka gambaran yang terjadi di Perancis serta yang berkecamuk dalam kehidupan politik rezim Orde Baru adalah konsep-konsep ekonomi-politik yang dirancang, dibangun, serta diterapkan oleh kalangan intelektual, justru, pada akhirnya ditentang oleh kalangan intelektual itu sendiri. Kenyataan-kenyataan semacam inilah yang semenjak awal telah diprediksikan serta begitu diyakini oleh Foucault bahwa terdapat relasi yang sangat kuat antara kekuasaan (*power*) dengan pengetahuan (*knowledge*). Kebenaran yang terdapat dalam kekuasaan akan sangat didukung oleh pengetahuan yang sedang disembarkannya ke tengah-tengah masyarakat. Kalau kekuasaan terus-menerus melakukan penindasan, siapakah yang akan memberikan persetujuan serta menunjukkan kepatuhan terhadapnya? Atau, kalau menggunakan paradigma yang dikemukakan Francis Bacon yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan (*knowledge is power*), tampaknya, rezim Orde Baru yang dibidani oleh kalangan militer serta teknokrat, sungguh-sungguh menerapkan konsepsi itu secara sangat bersemangat.

Keterkaitan antara paradigma Foucauldian mengenai relasi *power/knowledge* atau pun konsepsi Baconian mengenai *knowledge is power* dapat dilacak dari keterlibatan intelektual-ekonom serta ketersediaan ilmu-ilmu sosial untuk diaplikasikan dalam istilah agung yang paling dibanggakan rezim Orde Baru, yaitu pembangunan. Rezim Orde Baru yang merekrut sejumlah intelektual dalam lingkup birokrasi-kekuasaannya mampu menunjukkan suatu fakta betapa kuatnya sebuah kekuasaan untuk memilih persona-persona tertentu yang mempunyai pengetahuan. Realitas ini tidak saja menunjukkan suatu bukti bahwa kekuasaan tidak saja dapat memilih persona-persona yang dikehendaknya. Tetapi seiring dengan itu kekuasaan juga mempunyai kemampuan untuk melakukan pensortiran terhadap jenis-jenis pengetahuan tertentu (dalam kaitan ini adalah ilmu-ilmu sosial) yang disukainya serta bagaimana proses regulasi terhadap persona yang mengajarkan pengetahuan serta bagaimana mekanisme atau pun cara-cara jenis-jenis pengetahuan itu dapat diajarkan. Perkembangan yang semakin nyata dalam rezim Orde Baru apabila melihat ilmu sosial sebagai ilmu tentang masyarakat, yaitu semua jenis penyelidikan yang berkaitan dengan sifat, kegiatan kerja, serta perkembangan masyarakat, ditemukanlah suatu truisme bahwa ilmu sosial menjadi ilmu yang dimiliki oleh negara serta ilmu tentang segala persoalan yang menjadi kepentingan negara (Kleden dalam Nordholt dan Visser [eds.], 1997: 35). Bukankah dengan karakter kepemilikan yang dikangkangi oleh pihak kekuasaan semacam ini, rezim Orde Baru mempunyai absolutisme untuk menentukan keberadaan serta arah perkembangan ilmu-ilmu sosial? Dan, dengan demikian, kalangan ilmuwan sosial pun harus tunduk serta patuh dalam rengkuhan kekuasaan rezim, dan bekerja tidak lebih layaknya tukang yang siap untuk melaksanakan semua perintah

yang dikomandokan pihak kekuasaan.

Rezim Orde Baru: Negara Modern Totaliter

Terdapat tiga teori sosial yang mempengaruhi kalangan intelektual pendukung rezim Orde Baru, yaitu: *Pertama*, adalah hipotesis Lipset yang menyatakan bahwa demokrasi politik secara umum akan dapat direalisasikan setelah pembangunan dalam bidang perekonomian berhasil diwujudkan; *kedua*, adalah argumentasi yang dikemukakan Daniel Bell yang menegaskan mengenai “the end of ideology”. Bell menyatakan argumentasinya bahwa akibat dari kemajuan teknologi, maka pembangunan ekonomi di Barat telah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi pada masa Revolusi Industri, sehingga bangsa-bangsa Barat sekarang (dekade 1960-an) memandang politik berdasarkan ideologi sebagai sesuatu yang usang; *ketiga*, adalah teori yang dikedepankan Huntington mengenai akibat negatif dari mobilisasi sosial tidak terkendali dalam masyarakat yang sedang berkembang. Dalam pemikiran Huntington, yang lebih penting bagi masyarakat itu adalah pelembagaan politik. Untuk kepentingan kelestarian pihak pemerintah sendiri, maka tuntutan-tuntutan masyarakat akan partisipasi dapat disalurkan dengan cara-cara yang tertib (Mas’oed, 1994: 39-40).

Namun, apakah ketiga teori ilmu sosial yang sedemikian sangat dogmatis itu menunjukkan kemanjurannya pada saat diterapkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan rezim Orde Baru? Yang justru bermunculan adalah segala hal yang beraromakan omong kosong ketika dogmatisme teori ilmu sosial itu dilihat serta diterapkan secara sangat positivistik. Ilmu-ilmu sosial yang diterapkan secara bebas-nilai dalam rezim Orde Baru malahan menjadi sebuah titik-balik yang memperlihatkan ketololannya yang luar biasa. Hal ini dapat dilakukan pelacakan dengan kegagalan yang terjadi pada ketiga aliran teori ilmu sosial itu sendiri.

Pertama, adalah bukti kecerobohan rezim Orde Baru yang mendahulukan pembangunan ekonomi serta membungkam secara rapat-rapat pembangunan (atau bahkan sekadar diskusi) politik, ternyata, tidak memperlihatkan hasilnya sama sekali. Pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan yang -- konon katanya -- pesat, pada akhirnya, runtuh dalam waktu sekejap ketika nilai rupiah mengalami keanjlokkan terhadap dollar semenjak akhir tahun 1997. Fundamental ekonomi kuat yang diteriakkan keras-keras oleh Presiden Soeharto tidak lebih sebagai sebuah mimpi obsesif yang tidak pernah dapat dibuktikan secara konkret. Krisis moneter yang menghantam rezim Orde Baru semenjak akhir tahun 1997 sampai sekarang ini, belum memperlihatkan tanda-tanda untuk mengalami perbaikan.

Kedua, perkembangan serta kemajuan teknologi yang sedemikian pesat di negara-negara Barat sehingga mampu mengeliminasi segala pertentangan ideologis juga tidak dapat dibuktikan secara sedemikian mudah dalam wilayah rezim Orde Baru. Teknologi tinggi (*hi-tech*) yang dibangga-banggakan yang selalu coba dibuktikan dengan produksi kapal terbang, tidak mempunyai keunggulan kompetitif apapun, kecuali dapat dipertukarkan dengan sekian ton beras ketan. Orientasi teknologis dengan mengandalkan berbagai pertimbangan yang bersifat matematis-rasional, sehingga dapat mengatasi ciri spesifik ideologi yang ditempatkan sebagai mistis-irasional, justru, membuahkan ideologisasi terhadap pembangunan yang dikehendaki sebagai bersifat anti-ideologi. Pembangunan pada akhirnya semakin memperlihatkan kekuatan ideologisnya sendiri ketika hanya menjadi pengetahuan yang justru menindas pengetahuan-pengetahuan lain yang dianggapnya tidak mendukung pelaksanaan pembangunan. Sehingga yang bermunculan kemudian adalah pembangunan sebagai jenis gagasan yang hanya menciptakan kesadaran-palsu (*false-consciousness*) yang cara bekerjanya sebagaimana layaknya sebuah *camera*

obscura yang selalu memuntir serta memutar-balikkan kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketiga, pelaksanaan partisipasi politik yang selalu dibayangkan akan berjalan tertib dengan jalan penciptaan lembaga-lembaga politik resmi yang disetujui negara, hanya memunculkan watak rezim Orde Baru yang sangat korporatis. Partisipasi politik masyarakat yang hanya boleh dilakukan apabila diwadhahi oleh organisasi-organisasi resmi yang memperoleh pengakuan serta perizinan dari negara, justru, menciptakan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat. Yang tampak kemudian adalah kemenonjolan dari partisipasi politik itu sendiri yang lebih menunjukkan aspek pemberian persetujuan dan dukungan terhadap negaralah yang dapat dilakukan. Sedangkan partisipasi politik yang mencoba memberikan kekritisian serta menolak terciptanya konsensus yang dipaksakan pihak rezim, selalu ditindas sampai derajat yang paling tuntas. Siapapun yang mencoba menciptakan partisipasi dengan cara-cara *dissensus* akan dituduh sebagai subversif, membangkang, serta *dissident*.

Sehingga, sesungguhnya, hal yang paling kentara dalam kehidupan rezim Orde Baru adalah proses berlangsungnya kekuasaan yang tidak memperoleh dukungan dari masyarakat secara partisipatoris. Pilihan untuk melakukan mobilisasi dianggap oleh pihak rezim Orde Baru sebagai sudah memadai untuk memperoleh dukungan secara legitimatif dari kalangan masyarakat. Partai-partai politik serta organisasi kemasyarakatan yang populis sengaja dimandulkan, sehingga rezim Orde Baru pun hanya memperoleh dukungan melalui strategi yang lebih bersifat sebagai paksaan belaka. Namun, dengan tanpa dukungan partai-partai ini, semakin terbukalah peluang bagi rezim Orde Baru untuk menciptakan “model otoritarian dari modernisasi” serta diangkatnya teknokrat sebagai anggota kabinet (Milne, 1984: 40). Konsekuensi paling telak dari keyakinan rezim Orde Baru terhadap modernisasi yang dibayangkan akan berjalan secara lancar, lurus, serta linear adalah diaplikasikannya konsep-konsep teknokratis yang sangat menunjukkan watak totaliternya.

Rezim Orde Baru sebagai sebuah negara yang berorientasikan pada paradigma berpikir modern, secara sangat nyata, telah menjelma sebagai “teater politik” (*Theatrum Politicum*), yakni sebuah perjumpaan antara bermacam-macam karakter dalam berbagai wacana yang telah diatur sedemikian rupa oleh para pengatur laku (*script writer*). Apabila dipahami dengan pemikiran Pierre Bourdieu, maka berlangsungnya teater politik itu adalah terjadinya dinamika hubungan antara mereka yang mewakili (aktor-aktor), mereka yang diwakili (karakter-karakter), serta para agen (mereka yang menghendaki serta menentukan pola-pola tertentu dalam kaitan antara aktor serta karakter yang ada). Kepuasan akan dapat dicapai, demikian Bourdieu memberikan penegasan, apabila para aktor dengan berbagai karakternya dapat memenuhi kehendak para agen yang memintanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu (dalam Hadiwinata, 1993: 3).

Dalam kasus yang terjadi pada rezim Orde Baru yang berpondasikan pada cara bernalar modern yang totaliter, “teater politik” itu digelar dalam sebuah pelataran negara fasistik yang menampilkan aktor-aktor serta karakter-karakter yang berasal dari kalangan aparaturnegara represif (seperti militer, polisi dan tentara yang menggunakan cara-cara kekerasan) serta aparaturnegara ideologis (sekolahan, pendidikan, media massa, serta penataran-penataran yang menyebarkan berbagai pengetahuan yang kebenarannya selalu diabsolutkan), untuk meminjam konsep kunci yang dikemukakan Louis Althusser. Sedangkan para agennya tidak lain adalah kalangan teknokrat yang mencoba berpikir serta menuliskan segala resep untuk dijadikan skenario besar dalam apa yang disebut sebagai pembangunan. Tentu saja, para agen yang terdiri dari kalangan teknokrat itu menuliskan skenario dengan berdasarkan perhitungan

yang telah ditulis oleh kalangan *script writer* di mana dalam kasus ini adalah teoritis ilmu sosial yang dianggap valid untuk memodernisasikan langkah-langkah pembangunan rezim Orde Baru, seperti Lipset, Daniel Bell, serta Huntington.

Proyek modernitas yang digulirkan rezim Orde Baru pada titik kulminasinya menciptakan sebuah mitos mengenai kemajuan yang diciptakan dengan menerapkan *grands recits* atau *metarecits*, yaitu kisah-kisah besar yang mempunyai fungsi untuk mengarahkan serta menjiwai masyarakat modern, serupa sebagaimana halnya dengan mitos-mitos yang mendasari masyarakat primitif pada zaman dahulu, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Jean-Francois Lyotard. Layaknya peran mitos dalam masyarakat primitif, kisah-kisah agung dalam zaman modern tersebut juga memberikan legitimasi terhadap institusi-institusi serta praktik-praktik sosial dan politik, sistem hukum dan moral, serta keseluruhan cara berpikir. Perbedaannya adalah bahwa kisah-kisah agung itu tidak mencari keabsahan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada masa awal (seperti penciptaan oleh dewa-dewa), namun dalam suatu masa depan dengan suatu Ide yang harus direalisasikan (dalam Bertens, 1996: 348).

Sejumlah *Grand Narratives* yang selalu diceritakan dan dipaksakan menjadi pola berpikir serta bagi arah bergulirnya sejarah rezim Orde Baru dapat dilihat pada diterapkannya Trilogi Pembangunan yang diyakini kebenarannya secara sangat mutlak. Semua kalangan yang berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru harus mematuhi dengan memberikan pola berpikir yang serupa untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai pertumbuhan, pemerataan, serta stabilitas. Ketiga *logos* (cara berpikir) yang serba memusat itu pada akhirnya menciptakan *logosentrisme* yang tidak boleh ditolak oleh siapapun, karena nilai kebenarannya tidak sedikit pun boleh disanggah. Penciptaan *logosentrisme* yang totaliter ini menjadikan rezim Orde Baru sangat alergi terhadap pihak yang tidak memberikan persetujuan terhadap keberlangsungan kekuasaannya. Kesemua inilah yang mendorong rezim Orde Baru tidak mempunyai toleransi untuk mengakui pihak “yang Lain” (*the Other*) yang secara paranoid oleh rezim Orde Baru dianggap akan selalu melawan, merongrong, dan yang pasti membahayakan *logosentrisme* yang selama ini diyakini kebenarannya.

Mengapa Perlawanan Menjadi Hak?

Namun, mengapa aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang oleh pihak kekuasaan dianggap sebagai *the Other* yang membahayakan itu masih tetap berlangsung? Serta mengapa pula sikap intoleransi rezim Orde Baru terhadap *the Other* yang diwujudkan dalam kekerasan fisik dengan berjatuhnya sejumlah aktivis mahasiswa serta dikacaukannya suasana kampus dengan berbagai tindak kekerasan oleh aparat militer, tetap saja tidak menyurutkan keinginan mahasiswa untuk terus melakukan aksi unjuk rasa untuk memberikan suatu pembuktian betapa perlawanan terhadap rezim Orde Baru tersebut memang harus dilakukan?

Dan, indikasi-indikasi apakah yang justru membuat masyarakat tidak menyeringai mengekspresikan ketakutannya sekalipun sejumlah aktivis non-kampus (Ratna Sarumpaet atau Barisan Merah Putih, misalnya) ditangkap tanpa prosedur moralitas hukum yang memadai dan juga diculiknya sejumlah tokoh kritis? Apakah ini sebagai pertanda yang semakin pekat bahwa rezim Orde Baru sudah dalam kondisi krisis legitimasi serta krisis kredibilitas (jadi tidak saja sekadar krisis moneter)? Sehingga penciptaan rezim Orde Baru untuk menyajikan nuansa negara sebagai suatu Leviathan yang serba menebarkan ketakutan yang sangat mencekam, dan kemudian masyarakat dapat diatur dengan sedemikian deterministik layaknya perputaran jarum arloji sebagaimana pernah diungkapkan Thomas

Hobbes (dalam Magnis-Susesno, 1991: 71-72), hanyalah perilaku sia-sia yang wajib ditertawakan? Mengapa intimidasi, berbagai bentuk teror, serta penghambusan ketakutan yang mencengkeram nyali sama sekali tidak mengendorkan perlawanan yang terus berlangsung sampai sekarang ini?

Atau, secara lebih singkat serta dengan tegas dapat diungkapkan: Mengapa perlawanan atau resistensi selalu berlangsung dalam sebuah arena kekuasaan? Terdapat dua pendapat yang dapat disajikan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu: *Pertama*, dari perspektif otoritas moral sebagai dasar dari relasi-relasi sosial dan stabilitas sosial; serta *kedua*, bahwa terdapat keharusan struktural yang menjadi penentu tindakan dan perilaku individual, termasuk kepatuhan dan perlawanannya terhadap kekuasaan. Alasan yang kedua ini biasanya dianut oleh kalangan penganut strukturalisme, baik yang Marxis maupun yang non-Marxis (Hikam, 1990: 74). Jika secara tentatif dilakukan pelacakan dengan lebih mendalam, faktor otoritas moral atautkah keharusan struktural yang menentukan perlawanan itu sendiri?

Otoritas moral mengandaikan adanya kemampuan manusia (humanisme) sebagai pusat dari segala perubahan, sehingga kekuatan eksistensial manusialah yang menuntun terjadinya perlawanan terhadap kekuasaan. Filsafat yang demikian ini lebih mendekati pada pemahaman Sartre tentang manusia yang menyatakan bahwa “Aku ada, maka Aku berpikir”. Atau secara lebih nyata, humanisme semacam ini terdapat dalam gagasan filsafat yang dikemukakan Albert Camus yang menyatakan bahwa “Aku memberontak, maka Aku ada”. Jadi, pemberontakan atau pun perlawanan menjadi sumber dasar untuk membuktikan keberadaan (eksistensi) manusia. Namun, humanisme itu menjadi sejenis idealisme yang sedemikian murni apabila tidak dikaitkan dengan struktur sosial yang mendasarinya. Struktur sosial dalam relasi yang demikian ini menjadi lingkup yang mendorong adanya perubahan sebagaimana diungkapkan Marx bahwa “keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia, dan bukan sebaliknya bahwa kesadaranlah yang menentukan keberadaan manusia”. Dapat diberikan suatu konklusi bahwa antara otoritas moral dengan struktur sosial saling mempunyai keterkaitan yang bersifat dialektis serta saling menentukan bagi munculnya perlawanan-perlawanan dalam suatu lingkup kekuasaan tertentu.

Adalah menjadi realitas historis yang sangat masuk akal apabila kalangan mahasiswa yang justru secara aktif melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Hal ini lebih dikarenakan pada alasan bahwa mereka mempunyai komitmen serta otoritas moral yang tinggi terhadap penderitaan-penderitaan yang berlangsung di sekitarnya. Sebagai intelektual, kalangan mahasiswa mempunyai kemampuan berpikir serta kapasitas keilmuan untuk membaca struktur sosial yang secara kontinyu mengalami perubahan. Atau dalam penilaian Antonio Gramsci yang meyakini bahwa struktur-struktur sosial secara abadi mengalami perubahan, dan dalam kaitan ini Gramsci memandang bahwa kalangan intelektual selalu mempunyai sifat mobil dalam struktur-struktur yang demikian ini. Bagi Gramsci, kalangan intelektual selalu merefleksikan keterkaitan sosial yang melingkupinya. Sebenarnya, istilah intelektual itu sendiri pertama kali digunakan secara luas di Perancis pada tahun 1898 sebagai sebuah konsekuensi dari *manifeste des intellectuels* yang memprotes pemenjaraan yang dilakukan terhadap Alfred Dreyfus (Liss, 1991: 1).

Perspektif Gramscian menyajikan suatu analisis yang khas bahwa mahasiswa sebagai kalangan intelektual selalu mempunyai keterkaitan, komitmen, dan selalu membela kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang mengalami penindasan. Padahal apabila dilakukan telaah secara lebih jernih, sesungguhnya, mahasiswa itu sendiri tidak berada dalam posisi kelas yang jelas. Mahasiswa bukanlah

kelas borjuis, dan bukan juga kelas proletar (pekerja). Secara sosial historis, mahasiswa berkedudukan dalam posisi pra-kelas yang berarti bahwa mereka merupakan kelompok sosial yang memasuki suatu tataran persiapan kelas yang khusus, yaitu semacam jalur (*trajectory*) yang berhubungan dengan karier dan profesi tertentu dalam masa depan. Dengan kedudukan pra-kelasnya inilah, maka kepentingan-kepentingan politik serta corak kesadaran kelasnya selalu mengalami perubahan yang tergantung pada ideologi atau gagasan-gagasan dominan yang melingkupi kehidupan masyarakat dalam kurun waktu sejarah tertentu yang bersifat konkret serta spesifik (Radjab, 1991: 78).

Kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap posisi kelas mahasiswa, tampaknya, menempatkan mereka dalam posisi yang serba istimewa, namun juga rentan untuk selalu mendapatkan tuduhan sebagai pihak yang selalu “ditunggangi”. Keadaan semacam ini menjadikan Arief Budiman (1976: 55-65) memberikan identifikasi bahwa mahasiswa merupakan sekelompok *resi* atau *hajar* yang tidak mempunyai pamrih terhadap kekuasaan sebagaimana halnya dikonsepsikan Ben Anderson dalam melihat kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Dalam penilaian Ben Anderson, para pertapa serta begawan (*resi, begawan, ajar*) merupakan juru ramal yang mendiagnosis kebobrokan dalam kerajaan dan memberikan peringatan mengenai kejatuhan dinasti yang semakin dekat. Reaksi raja yang biasanya dicatat adalah kemarahan. Sehingga muncullah berbagai perilaku kasar terhadap para juru ramal ini yang berwujud pemukulan, penyiksaan, serta pembunuhan. Namun, sesungguhnya, sikap keras kekuasaan itu sendiri hanya akan memberikan pembuktian bahwa apa yang dikatakan kalangan juru ramal ini akan mendekati kenyataan (Ben Anderson dalam Budiardjo [ed.], 1991: 106-107).

Perilaku kekerasan yang diperlihatkan negara untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dalam rezim Orde Baru hanya akan memberikan suatu pembuktian bahwa negara mengalami ketakutan dalam menanggapi tuntutan yang dilontarkan kalangan mahasiswa. Sehingga bahasa-bahasa kekuasaan yang selalu bermunculan adalah menunjukkan karakter yang sedemikian defensif di mana mahasiswa telah dituduh telah melakukan politik praktis. Pemberian terminologi politik praktis versus politik moral terhadap mahasiswa menunjukkan keinginan dari pihak rezim Orde Baru untuk membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berpikir, berpartisipasi, serta melakukan tindakan praksis terhadap wacana keilmuan yang selama ini telah diterimanya. Dengan penggunaan ungkapan politik praktis seakan-akan mahasiswa telah memasuki bidang yang diharamkan untuk dimasuki. Sehingga kematangan mahasiswa selalu dipertanyakan, karena dianggap belum terlalu dewasa untuk menjalankan partisipasi politik. Terminologi politik praktis yang berulang kali didengungkan rezim Orde Baru untuk menciptakan stigmatisasi terhadap aksi-aksi demonstrasi mahasiswa juga memberikan pengandaian bahwa dalam dunia politik tidak perlu diperhitungkan moralitas. Bukankah selama ini rezim Orde Baru selalu menggiring kalangan mahasiswa untuk berada dalam sangkar moralitas yang kesuciannya tidak boleh dikotori oleh sifat praktis dari politik? Pencegahan untuk melakukan politik praktis bagi kalangan mahasiswa juga menunjukkan keinginan pihak rezim Orde Baru untuk memisahkan antara dunia keilmuan dengan dunia kemasyarakatan. Kalangan mahasiswa diperbolehkan berteriak sekritis apapun asalkan masih dalam ruang lingkup kampus. “Pergaulan” mahasiswa dengan masyarakat sebagai implementasi dari relasi antara teori-dan-praksis keilmuan sengaja dicegah negara, agar gelombang perlawanan itu dapat dilokalisasi dalam wilayah kemasyarakatan paling kecil serta dipandang secara istimewa, yaitu kampus.

Padahal persoalan sesungguhnya bukanlah terletak pada dikotomi politik praktis versus politik moral di mana yang pertama hanya boleh digarap oleh pihak politisi yang menganggap dirinya sudah

profesional (partai politik, Golongan Karya, atau pun militer) sedangkan yang terakhir masih ditempatkan sebagai sekelompok amatir yang tidak boleh menyentuh dunia politik dari kalangan yang terlalu percaya diri terhadap profesionalismenya. Substansi persoalannya sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa “kemapanan” yang diciptakan kekuasaan sudah sedemikian kokoh untuk dirombak dengan prosedur yang sewajarnya. Mereka yang sudah menang dalam pemilihan umum seringkali merasa tidak terikat oleh janji-janji yang dilontarkan dalam kampanye (Hook dalam Kurtz [ed.], 1994: 82). Dalam kaitan persoalan ini dapat dilihat betapa Golkar sebagai pemegang mayoritas tunggal dalam pemilihan umum semenjak rezim Orde Baru didirikan tidak pernah memberikan reaksi apapun terhadap aksi-aksi demonstrasi yang dijalankan kalangan mahasiswa. Golkar hanya menunjukkan sikap konservatismenya untuk selalu memberikan persetujuan apapun terhadap segala hal yang dikehendaki pihak rezim. Bukankah seharusnya Golkar dapat menunjukkan sikap responsifnya serta mengartikulasikan suara-suara kritis yang dikemukakan mahasiswa dalam aksi-aksi demonstrasinya? Ataukah pemilihan umum itu sendiri tidak lebih berfungsi sebagai pemberi pengabsahan bagi rezim Orde Baru untuk memberikan bukti secara formal bahwa kekuasaan mereka telah betul-betul demokratis?

Konservatisme yang berakar sedemikian kuat dalam penyelenggaraan kekuasaan rezim Orde Baru menjadikan negara modern totaliter ini sangat statis bahkan stagnan. Kondisi ini diperparah dengan timpangnya struktur ekonomi-politik yang ditunjukkan oleh merebaknya kolusi, korupsi, serta nepotisme (disingkat dan sangat populer sebagai KKN dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa). Sehingga, sesungguhnya, perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa dengan kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hal ini dengan memperhitungkan dua persoalan pokok, yaitu hak seseorang untuk tidak pernah dipaksa bertindak yang bertentangan dengan suara hatinya serta hak seseorang untuk selalu dibiarkan bertindak dengan suara hatinya. Hak perlawanan yang dilakukan mahasiswa itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: *Pertama*, bahwa tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta *kedua*, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa (Magnis-Suseno, 1994: 146-158).

Tetapi yang harus diberikan penegasan adalah bahwa hak perlawanan yang diwujudkan oleh kalangan mahasiswa dalam aksi-aksi demonstrasi bukanlah bentuk-bentuk anarkisme. Ini dengan alasan yang jelas bahwa anarkisme secara prinsipal menolak hak eksistensi kekuasaan negara. Sedangkan, sebaliknya, hak perlawanan justru mengakui perlu adanya tatanan hukum dan kekuasaan yang menjamin keberlakuannya (Magnis-Suseno, 1994: 157). Sehingga apabila berbagai perlawanan yang ditunjukkan oleh mahasiswa selalu mendapatkan tanggapan yang defensif, bahkan cenderung memperoleh perlakuan yang represif serta koersif, yang berjalan dalam lingkup rezim Orde Baru itu sendiri bukanlah kekuasaan (*power*) yang mengandaikan kemampuan saling mengakui serta berkomunikasi, sebagaimana pernah diandaikan oleh Hannah Arendt. Justru yang sedang berlaku apabila rezim Orde Baru melakukan opresifnya secara menyeluruh adalah penindasan (*force*) yang mengandalkan cara-cara kekerasan (Magnis-Suseno dalam Hikam, 1996: xii dan Widyarsana, 1996: 43-55).

Demikianlah, secara keseluruhan dapat diungkapkan bahwa relasi *power/knowledge* serta *knowledge is power* yang mendasari kekuasaan rezim Orde Baru dengan ditunjukkan oleh watak teknokratismenya, justru, pada puncaknya menghasilkan berbagai pengetahuan alternatif. Jenis-jenis pengetahuan alternatif tersebut selama ini diselubungi serta ditindas rezim Orde Baru secara

habis-habisan dengan mekanisme kekerasan, yaitu suatu pengetahuan tentang bagaimana perlawanan merupakan kesadaran yang harus dilembagakan sebagai hak. Pengetahuan yang secara praksis terwujud dalam keberanian untuk melawan itu menjadi sejenis pemberontakan untuk selalu mendapatkan tanggapan dari pihak rezim. Jika perlawanan yang dilangsungkan mahasiswa itu selalu ditempatkan sebagai *the Other* yang diberi label sebagai anarkis serta ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu sama halnya dengan menuding raut muka rezim Orde Baru sendiri sebagai negara totaliter yang tidak mengakui perbedaan pendapat, pluralisme, serta dengan angkuhnya mengoperasikan kekerasan untuk disepadankan dengan menjaga stabilitas dan keamanan. Sebuah langkah bijak yang paling masuk akal bagi rezim Orde Baru adalah dengan tidak terus-menerus menyebarkan teror, kebencian, serta intimidasi terhadap siapapun yang melakukan perlawanan. Tidakkah Foucault selalu menyadarkan kita semua bahwa jika terdapat kekuasaan, maka seiring dengan itu terciptalah perlawanan? Dan, perlawanan itu selalu menyebar di mana-mana dengan berbagai bentuknya serta dilakukan oleh siapapun (jadi tidak hanya oleh kalangan mahasiswa serta kelompok intelektual belaka) yang menghendaknya, seiring dengan kekuasaan yang juga merembes dan membasahi seluruh lini kehidupan masyarakat.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O'G.
1991 "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa," dalam Budiarto, Miriam (ed.), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Bertens, K.
1996 *Filsafat Barat Abad XX Jilid II Perancis: Edisi Revisi dan Perluasan*, Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief
1976 "Peranan Mahasiswa sebagai Intelektual," *Prisma* No. 11 Tahun V, November.
- Hadiwinata, Bob Sugeng
1993 "Theatrum Politicum: Pasca-Modernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia," makalah pada *Seminar Pascamodernisme: Relevansinya bagi Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia Mutakhir*, Program Pasca-Sarjana Studi Pembangunan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 8-9 Oktober.
- Hikam, Muhammad A.S.
1990 "Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus," *Prisma* No. 8 Tahun XIX Agustus.
- Hook, Sidney
1994 "Protes Sosial dan Keras Kepala yang Beradab," dalam Kurtz, Paul (ed.), *Sidney Hook: Sosok Filsuf Humanis Demokrat dalam Tradisi Pragmatisme*, terj. Ignatius Gatut dan Avi Mahaningtyas, Jakarta: Yayasan Obor.
- Kleden, Ignas
1997 "Ilmu Sosial di Indonesia: Tindakan dan Refleksi dalam Perspektif Asia Tenggara," dalam Nordholt, Nico G. & Visser, Leotine E. (eds.), *Ilmu Sosial di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*, Jakarta: LP3ES.

- Liss, Sheldon B.
1991 *Radical Thought in Central America*, Boulder, San Fransisco, Oxford: Westview Press.
- Macdonell, Diane
1986 *Theories of Discourse: An Introduction*, New York: Basil Blackwell.
- Magnis-Suseno, Franz
1992 *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
1994 *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
1996 “Kedaulatan Rakyat, Bukan Kedaulatan Tuan,” Pengantar dalam Hikam, Muhamad A.S., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Mas’oed, Mohtar
1994 *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milne, R.S.
1984 “Teknokrat dan Politik di Negara-negara Asia Tenggara,” *Prisma* No. 3 Tahun XIII Maret.
- Poster, Mark
1990 *The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context*, Cambridge: Polity Press.
- Radjab, Suryadi A.
1991 “Panggung-Panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara: Geraan Mahasiswa di Bawah Orde Baru,” *Prisma* No. 10 Tahun XX, Oktober.
- Widyarsana, A.
1996 “Hubungan Kekuasaan dan Kekerasan menurut Hannah Arendt,” *Driyarkara* No. 2 Tahun XXII.